

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kini kita berada di zaman revolusi industri 4.0 bahkan sudah memasuki 5.0 yang ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat di bidang teknologi, yang terus berkembang karena tersambung dengan jaringan internet yang mengglobal. Manusia sangat terbantu karena dimudahkannya dalam melakukan akses terhadap informasi dalam berbagai cara, dan dapat menikmati layanan dari teknologi digital dengan bebas serta membantu masyarakat mendapatkan informasi tanpa batas. Perkembangan teknologi yang semakin berkembang sangat berpengaruh terhadap semua kegiatan manusia bahkan sampai kepada aspek tatanan pemerintah maupun non pemerintah yang mengikuti perkembangan teknologi. Salah satu bentuk perkembangan informasi teknologi adalah digitalisasi.

Pada masa digital ini, pengelolaan dokumen dalam wujud elektronik telah menjadi solusi untuk memudahkan manusia menyimpan data/dokumen, karena dengan menggunakan penyimpanan elektronik/digitalisasi bisa menghemat ruang penyimpanan fisik sekaligus membuka peluang akses yang lebih praktis dari penyimpanan fisik. Semakin banyak dan intensif institusi yang mencoba beralih dari pengelolaan berbasis dokumen fisik menjadi *Hibrida* atau sepenuhnya elektronik, tak terkecuali lembaga atau institusi pemerintah (Widiatmoko Adi, 2018).

Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 788 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kementerian Agama. Kementerian Agama berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Kementerian Agama perlu menyempurnakan pengelolaan data dan sistem informasi dengan menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji yang baik dan benar, maka ada beberapa orang atau organisasi-organisasi Islam memberikan pelayanan



﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْلُمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ۙ﴾

Artinya: “(Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafaṣ, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat”(Quraish Shihab, dkk, 2022 : 31).

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Sehingga tingkat kemauan untuk berhaji sangat tinggi. Dari tahun ke tahun peserta ibadah haji semakin meningkat. Dan terkadang melebihi kuota yang telah disediakan dari kebijakan penentuan kuota haji dari Arab Saudi sehingga berdampak terhadap daftar tunggu calon jamaah haji di Indonesia yang mencapai puluhan tahun.

Pengelolaan dokumen di setiap lembaga atau organisasi pada pemerintahan atau non pemerintahan banyak yang masih bersifat konvensional dihadapkan pada keterbatasan fasilitas maupun sumber daya yang mana faktor tersebut memiliki peran dan fungsi sebagai penunjang serta pendukung dalam pengelolaan dokumen. Pada dasarnya, pengelolaan dokumen yang dilakukan secara konvensional memang memerlukan waktu yang lama dalam proses pengelolaan dan penyebaran informasi dari arsip dokumen tersebut. Karena pengelolaan dokumen yang bersifat konvensional tidak dapat mendukung kebutuhan informasi yang cepat, tepat dan akurat.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dokumen yang telah mengakibatkan sulitnya ketika mencari dokumen yang di butuhkan dan khawatir dokumen tersebar sebar, hingga bisa mengakibatkan hilangnya dokumen itu karena tata kelolanya kurang baik. Maka dari itu pengelolaan dokumen memerlukan sistem yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan dokumen. Sistem yang tidak lagi bersifat



konvensional dan telah memanfaatkan teknologi yaitu menggunakan media elektronik yang berbasis Informasi Teknologi (IT).

Penerapan pengelolaan dokumen dengan menggunakan Informasi Teknologi (IT) ini merujuk pada perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang menjadi landasan dalam pengelolaan dokumen digital, antara lain :

- a. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pembangunan E-Government, bahwa : “Pemerintah harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk menciptakan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.”
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Ayat 1, bahwa : “Bahwa keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.”

Kementrian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji reguler bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pelayanan ibadah haji. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa : “Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan pelayanan Administrasi, bimbingan ibadah haji, akomodasi, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lainnya yang diperlukan oleh calon jamaah haji.” Termasuk dalam pengelolaan dokumen jamaah haji.

Dengan mengetahui bahwa dokumen haji berperan penting dalam kegiatan manajemen pada pelaksanaan ibadah haji, maka perlunya ada pengelolaan dokumen yang baik dan benar. Pengelolaan dokumen itu meliputi kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pemilihan dokumen yang

sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses pengelolaan pendaftaran haji yang memungkinkan isi dokumen dapat diakses, mengklasifikasikan dan mengindeks, menyiapkan, menyimpan dokumen, serta pencarian kembali dan penyajian (Aulia, 2019).

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) harus bisa memanfaatkan kemajuan Informasi Teknologi khususnya dalam bidang pengelolaan pendaftaran haji, dengan tujuan untuk terciptanya pengelolaan yang baik dan lebih efisien. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) mengimplementasikan dan memaksimalkan kemajuan Informasi Teknologi (IT) dalam sebuah lembaganya.

Dari hasil observasi lapangan ditemukan bahwasanya KBIH Badrul Munir Kota Cirebon belum sepenuhnya menerapkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi yang sampai sekarang sudah semakin canggih dan berkembang pesat. Bagaimanapun pemerintah sudah mengeluarkan keputusan untuk setiap lembaga pemerintah maupun non pemerintah untuk diharuskan memanfaatkan teknologi semaksimal dan seoptimal mungkin untuk terciptanya kemudahan dalam bekerja dan lain sebagainya.

Dari kasus ini peneliti melihat adanya kesenjangan antara pihak KBIH Badrul Munir Kota Cirebon dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih seiring berkembangnya zaman. Karena sebelum melakukan observasi ke KBIH Badrul Munir Kota Cirebon, peneliti juga melakukan observasi ke Kementerian Agama Kota Cirebon tepatnya ke bagian penanganan Haji dan Umroh. Di lokasi peneliti menemukan hal menarik untuk KBIH di Kota Cirebon dan KBIH Badrul Munir menjadi salah satu KBIH terbaik se-Kota Cirebon.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan observasi ke lokasi penelitian yaitu KBIH Badrul Munir Kota Cirebon ternyata setelah berkunjung ke KBIH Badrul Munir Kota Cirebon, memang KBIH Badrul Munir ini memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung untuk melakukan bimbingan manasik haji dan umroh. KBIH Badrul Munir juga

mempunyai tempat yang luas dan para pembimbing yang tersertifikasi resmi dan lengkap.

Setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata peneliti menemukan sebuah permasalahan di KBIH Badrul Munir Kota Cirebon ini yaitu di bagian pengimplementasian Informasi Teknologi (IT). Ternyata pihak KBIH Badrul Munir Kota Cirebon belum sepenuhnya menerapkan atau memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik akan terciptanya sebuah sistem yang baik dan mampu mempermudah kegiatan KBIH Badrul Munir Kota Cirebon ini.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi teknologi dalam pengelolaan pendaftaran jamaah haji. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Informasi Teknologi (IT) Dalam Pengelolaan Pendaftaran Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Badrul Munir Kota Cirebon.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Belum sepenuhnya menerapkan sistem informasi teknologi dalam pengelolaan pendaftaran haji.
2. Ketertinggalan informasi perkembangan teknologi di masa kini, untuk mendukung kebutuhan informasi yang lebih cepat dan mudah.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya pengetahuan tentang mengelola dokumen dan kurangnya sarana dan prasarana.

## **C. Pembatasan Masalah**

Melihat begitu luasnya pembahasan tentang pengelolaan dokumen haji seperti : dokumen pendaftaran haji, dokumen pembatalan haji, dokumen pelimpahan porsi dan dokumen administrasi pendaftaran haji. Maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah hanya berfokus pada pendaftaran ibadah haji di KBIH Badrul Munir Kota Cirebon.

#### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem pengelolaan pendaftaran haji di KBIH Badrul Munir Kota Cirebon?
2. Bagaimana Implementasi Informasi Teknologi dalam pengelolaan pendaftaran haji di KBIH Badrul Munir Kota Cirebon?
3. Bagaimana Hasil dari implementasi informasi teknologi dalam pengelolaan pendaftaran haji di KBIH Badrul Munir Kota Cirebon?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui :

- a. Untuk mengetahui sistem pengelolaan dokumen pendaftaran haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Badrul Munir Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui Implementasi Informasi Teknologi dalam pengelolaan dokumen pendaftaran haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Badrul Munir Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui Hasil dari Implementasi informasi teknologi dalam pengelolaan pendaftaran haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Badrul Munir Kota Cirebon.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat muslim Indonesia antara lain :

- a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi atau perbandingan dalam usaha pengembangan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya. Penelitian ini juga di harapkan menambah studi pembahasan mengenai pengelolaan dokumen/arsip.

- b. Bagi Praktisi



Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengalaman baru dalam pengimplementasikan teknologi dalam pengelolaan pendaftaran haji pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Badrul Munir Kota Cirebon.

